

TEMUAN FITRA

Aparat Hukum Jangan Hanya DIAM !!!

PALU, MERCUSUAR - Hasil survey Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan Sulteng sebagai daerah terkorup pada tahun 2010, patut direspon aparat hukum. Aparat hukum diminta menindaklanjuti temuan itu, dan jangan hanya diam.

Fitra dalam dialog di Metro TV dengan Mendagri merilis kerugian keuangan Sulteng mencapai Rp170 M. menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, menyatakan jika temuan Fitra benar, maka ada sekira 11 persen kebocoran APBD Sulteng yang totalnya mencapai

Rp1,2 triliun.

"Jika benar itu besar sekali. Saya

kira Fitra bias melaporkannya ke aparat hukum dan memberikan datanya ke Deprov sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Sebaliknya, aparat hukum juga harus merespon ini dan segera melakukan penelusuran," ujar Markus, ditemui di ruang kerjanya kemarin (20/6).

Hasil survey Fitra kata Markus, jauh dengan temuan BPK yang

merupakan acuan resmi dan standar audit keuangan Negara. "Mungkin metodenya beda. Tapi bagi saya itu menarik untuk dibuka," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng, saldo kerugian daerah Pemprov Sulteng berdasarkan hasil pemantauan terhadap penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebesar Rp84,10 miliar

dengan jumlah 42 kasus.

Sebelumnya, kasus kerugian keuangan daerah sejak tahun 1989 hingga 2010 berjumlah 44 kasus dengan nilai Rp88,99 miliar. Hanya saja dua kasus dengan nilai Rp177,36 juta telah diselesaikan, sedangkan yang diangsur sebanyak 13 kasus sebesar Rp4,71 miliar.

Baca DIAM di hal.11

Kerugian Daerah atas Pengelolaan Keuangan APBD 2010 Pemprov Sulteng

Lembaga	Temuan	Kerugian
BPK RI Perwakilan Sulteng	Rp51,09 M	Rp84,10 M
Fitra		Rp170 M

Sumber: LHP BPK dan Dialog Fitra

Pemprov Sulteng Peroleh penilaian WDP

DIAM

Saldo kerugian daerah tersebut dilaporkan BPK RI Perwakilan Sulteng berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulteng Tahun Anggaran (TA) 2010. Dalam laporan tersebut, disebutkan jumlah temuan senilai Rp51,09 miliar atau 1,38 persen dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp3,69 triliun. Sehingga, BPK RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Dadang Gunawan saat penyerahan LHP di Deprov menyebutkan, pertimbangan LKPD Pemprov Sulteng memperoleh penilaian WDP, disebabkan adanya pengecualian yaitu, nilai aset tetap

pada neraca per 31 Desember 2010 tersebut tidak berdasarkan laporan barang milik daerah (LBMD) TA 2010 yang memuat seluruh daftar aset dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikannya. Selain itu, realisasi pendapatan retribusi daerah belum mencakup pendapatan pelayanan kesehatan atas klaim Jamkesmas sebesar Rp6,1 miliar pada RSUD Undata yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan digunakan langsung.

BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulteng untuk TA 2007 hingga 2008 dengan WDP. TA 2009 dengan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) dan TA 2010 dengan opini WDP. Dengan demikian, sejak TA 2007 hingga 2010, tren opini

sambungan dari hal. 1

atas LKPD Provinsi Sulteng adalah meningkat. Selain pemberian opini atas kewajaran penyajian LK, hasil pemeriksaan BPK RI juga memuat temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), yaitu sebanyak delapan temuan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 11 temuan.

Adapun hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sejak tahun 1996 hingga 2010 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 213 dengan 500 rekomendasi BPK RI. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 152 rekomendasi atau 30,40 persen dan 348 rekomendasi atau 69,60 persen belum sepenuhnya ditindaklanjuti. TMU